



## Krisis SDM di Kelurahan Jadi Sorotan DPRD Yogya



MERAPI-Istimewa

### FGD yang digelar Komisi A DPRD Kota Yogyakarta.

**YOGYA (MERAPI)** - Kekurangan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta menjadi perhatian serius. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian untuk mencari solusi atas ketimpangan SDM di kelurahan. Kajian tersebut dilakukan bersama tim ahli serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. "Jangan sampai kelurahan yang memiliki peran vital dalam menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru ter-

kendala masalah kekurangan SDM. Kami sedang melakukan kajian mendalam bersama tim ahli untuk mencari jalan keluar," ujarnya.

Sebagai bagian dari proses kajian, Komisi A DPRD Kota Yogyakarta telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan tenaga ahli, organisasi perangkat daerah (OPD), serta

para lurah se-Kota Yogyakarta. Diskusi tersebut difokuskan pada pemetaan beban kerja dan identifikasi hambatan administratif yang selama ini dihadapi di tingkat kelurahan.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa sebagian besar kelurahan di Kota Yogyakarta masih kekurangan personel struktural. Ketua Forum Lurah Kota Yogyakarta, Hendy Setiawan, membenarkan kondisi tersebut. "Dari total 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, baru enam kelurahan yang kebutuhan SDM strukturalnya terpenuhi 100 persen. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada distribusi beban kerja di lapangan," jelasnya.

Menurut Hendy, keterbatasan personel membuat beban kerja di kelurahan semakin berat, sementara tuntutan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.

Karena itu, pihaknya berharap ada langkah cepat untuk membantu mengatasi persoalan tersebut. "Kami berharap ada langkah cepat atau shortcut untuk membantu meringankan beban kerja lurah dan jajarannya," katanya.

Salah satu usulan yang muncul dalam pembahasan adalah penyederhanaan struktur organisasi kelurahan agar lebih efisien dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.

Sementara itu, Susanto menegaskan hasil kajian yang tengah disusun tidak akan berhenti pada pembahasan internal. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan disampaikan kepada pihak eksekutif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, rekomendasi tersebut dapat menjadi acuan bagi berbagai instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam perencanaan pembangunan wilayah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pengelolaan aparatur, serta Bagian Organisasi dalam penataan kelembagaan kelurahan. "Harapannya ada solusi yang komprehensif. Kita ingin struktur organisasi yang lebih sederhana namun diisi oleh SDM yang kompeten, sehingga pelayanan publik di level kelurahan tetap optimal," ujarnya.

(C-12)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005